


ANALISIS PERAN BEA MATERAI DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Khairunissa Alisyah Hasibuan^{1*}, Dini Vientiany², Siti Aulia Zannah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : khairunissaalisyahhasibuan@gmail.com¹, dini1100000167@uinsu.ac.id²,
auliazannah568@gmail.com³

<p>Menerima: 07/06/2026</p> <p>Diterima: 11/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 12/06/2026</p> <p>Correspondence*</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstract : This study aims to analyze the role of stamp duty in tax administration in Indonesia by reviewing aspects of document legality, taxpayer compliance, and the effectiveness of its implementation within the modern taxation system. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through a literature study sourced from scientific journals, books, and relevant laws and regulations. The results show that stamp duty plays an important role as a legal instrument that provides evidentiary power to documents and supports orderly tax administration. In addition, the implementation of electronic stamp duty offers convenience, efficiency, and increased transparency in transaction monitoring. However, its implementation still faces several challenges, such as low public understanding, limited digital literacy, and differences in interpreting existing regulations. Therefore, continuous efforts are needed through increased public outreach, regulatory strengthening, and technological optimization to support the effective implementation of stamp duty in a more modern, transparent, and accountable tax administration system.</p> <p>Keywords: Stamp duty, tax administration, taxpayer compliance, digitalization</p>
--	---

1. PENDAHULUAN

Bea materai merupakan salah satu instrumen fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendukung tertib administrasi serta memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan hukum. Kehadiran bea materai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengesahan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum. Dalam praktiknya, bea materai digunakan pada berbagai jenis dokumen seperti perjanjian, akta, dan dokumen transaksi keuangan yang memiliki nilai ekonomis tertentu. Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan modern, peran bea materai semakin relevan dalam menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan. Selain itu, penerapan bea materai juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Biran et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk dalam penerapan bea materai elektronik. Transformasi ini memungkinkan penggunaan bea materai tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga dapat diterapkan pada dokumen elektronik yang semakin banyak digunakan dalam transaksi modern. Implementasi bea materai elektronik memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan praktis, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti pemahaman masyarakat terhadap aturan baru, keamanan sistem digital, serta potensi penyalahgunaan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif dan penguatan sistem teknologi agar penerapan bea materai elektronik dapat berjalan secara optimal dalam mendukung

administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi (Hidayat & Sari, 2022).

Dalam konteks administrasi perpajakan, bea materai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup kepatuhan dalam penggunaan dokumen yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan bea materai yang tepat pada dokumen tertentu mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan bea materai juga dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan administratif dalam sistem perpajakan secara keseluruhan. Dengan adanya pengawasan yang baik, penggunaan bea materai dapat membantu meminimalisir praktik-praktik pelanggaran yang merugikan negara. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bea materai menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan (Aulia & Pratama, 2023).

Penerimaan negara dari sektor bea materai juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam struktur pendapatan negara, meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Namun demikian, keberadaan bea materai tetap memiliki nilai strategis dalam mendukung stabilitas penerimaan negara serta memperkuat sistem administrasi perpajakan. Evaluasi terhadap efektivitas penerimaan bea materai menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, analisis terhadap penerimaan bea materai juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan bea materai perlu terus dilakukan melalui perbaikan kebijakan, peningkatan pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan (Kurniawan & Lestari, 2023). Secara yuridis, bea materai memiliki fungsi penting dalam memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam berbagai transaksi. Dokumen yang telah dibubuhi bea materai memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat di pengadilan dibandingkan dengan dokumen yang tidak menggunakan bea materai sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa bea materai tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai bea materai juga diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penggunaannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap aspek hukum bea materai menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang sering melakukan transaksi berbasis dokumen (Suwarno & Haryanto, 2021).

Meskipun memiliki peran yang penting, penerapan bea materai masih menghadapi berbagai permasalahan dalam praktiknya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penggunaan bea materai yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi nominal maupun jenis dokumen yang dikenakan. Selain itu, masih terdapat kasus penggunaan bea materai lebih dari satu pada dokumen tertentu yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dalam melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan bea materai yang benar. Dengan demikian, diharapkan permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dan sistem administrasi perpajakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien (Dewangga et al., 2025). Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bea materai memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung administrasi perpajakan di Indonesia, baik dari aspek fiskal, administratif, maupun yuridis. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam mengenai peran bea materai dalam administrasi perpajakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia secara keseluruhan (Siregar & Lubis, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Bea Materai dalam Sistem Perpajakan

Bea materai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomis. Dalam sistem perpajakan Indonesia, bea materai memiliki fungsi sebagai alat legitimasi terhadap dokumen agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Keberadaan bea materai juga mencerminkan peran negara dalam mengatur dan mengawasi aktivitas administrasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan perjanjian hukum. Dengan adanya bea materai, setiap dokumen yang digunakan dalam kegiatan administratif memiliki nilai formal yang diakui oleh negara, sehingga dapat meminimalisir sengketa di kemudian hari. Selain itu, pengenaan bea materai juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan jenis pajak lainnya (Biran et al., 2024). Dalam praktiknya, objek bea materai mencakup berbagai jenis dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, dan dokumen transaksi keuangan tertentu. Pengaturan mengenai objek, tarif, dan tata cara pemungutan bea materai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penggunaannya. Pemahaman yang baik mengenai konsep bea materai sangat penting bagi wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Kesalahan dalam penerapan bea materai dapat berdampak pada tidak sahnya dokumen secara hukum atau dikenakannya sanksi administratif. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan terkait bea materai menjadi hal yang penting dalam mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (Tambunan & Amanda, 2025).

2.2 Bea Materai Elektronik dalam Administrasi Perpajakan Modern

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem perpajakan menuju digitalisasi, termasuk dalam penerapan bea materai elektronik. Bea materai elektronik merupakan inovasi yang memungkinkan penggunaan materai dalam bentuk digital pada dokumen elektronik, sehingga lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan materai konvensional. Implementasi bea materai elektronik juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penggunaan bea materai secara online tanpa harus menggunakan materai fisik, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya (Hidayat & Sari, 2022). Namun demikian, penerapan bea materai elektronik juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan sistem, validitas dokumen elektronik, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Selain itu, diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bea materai elektronik. Dengan demikian, penerapan bea materai elektronik tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan di Indonesia (Nugroho & Fitriani, 2024).

2.3 Peran Bea Materai dalam Kepatuhan Administrasi Perpajakan

Bea materai memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan, khususnya dalam penggunaan dokumen yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kepatuhan ini mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan bea materai pada dokumen tertentu menunjukkan bahwa wajib pajak telah memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang tertib dan teratur. Selain itu, kepatuhan terhadap penggunaan bea materai juga dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dokumen administrasi (Aulia & Pratama, 2023). Lebih lanjut, peran bea materai dalam administrasi perpajakan juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara serta memperkuat sistem pengawasan. Dengan adanya kewajiban penggunaan bea materai, pemerintah dapat memantau aktivitas ekonomi masyarakat melalui dokumen yang digunakan dalam transaksi. Hal ini memungkinkan adanya kontrol yang lebih baik terhadap potensi kebocoran penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dalam penggunaan bea materai perlu didukung oleh kebijakan yang efektif, sistem pengawasan yang kuat, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran bea materai dalam administrasi perpajakan (Maulana & Rahmawati, 2021).

2.4 Aspek Hukum dan Efektivitas Penerapan Bea Materai

Dari perspektif hukum, bea materai memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap dokumen yang digunakan dalam transaksi. Dokumen yang telah dibubuhi bea materai sesuai ketentuan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini menjadikan bea materai sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian di pengadilan. Selain itu, keberadaan regulasi yang mengatur bea materai memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan dokumen yang sah dan diakui oleh negara (Suwarno & Haryanto, 2021). Meskipun demikian, efektivitas penerapan bea materai masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaksesuaian dalam penggunaan, serta adanya interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap kebijakan bea materai menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana implementasinya telah berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta sosialisasi agar penerapan bea materai dapat lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan bea materai dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung administrasi perpajakan yang efektif, transparan, dan berkeadilan (Rahman & Putri, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran bea materai dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan konsep, kebijakan, serta implementasi bea materai, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran bea materai dalam administrasi perpajakan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti serta memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas dan implementasi bea materai dalam sistem perpajakan secara menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Peran Bea Materai dalam Administrasi Perpajakan

No	Aspek Peran	Deskripsi	Implikasi Administrasi	Tantangan
1	Legalitas Dokumen	Memberikan kekuatan hukum pada dokumen	Meningkatkan validitas dokumen	Kurangnya pemahaman masyarakat
2	Kepatuhan Pajak	Mendorong wajib pajak taat aturan	Administrasi lebih tertib	Minimnya sosialisasi
3	Penerimaan Negara	Sumber pendapatan negara	Mendukung fiskal negara	Kontribusi relatif kecil
4	Pengawasan Transaksi	Memudahkan kontrol dokumen	Transparansi meningkat	Potensi manipulasi
5	Administrasi Formal	Standarisasi dokumen resmi	Sistem lebih terstruktur	Kesalahan penggunaan

Bea materai memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung administrasi perpajakan, terutama dalam aspek legalitas dokumen yang digunakan oleh masyarakat. Setiap dokumen yang telah dibubuhi bea materai memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bea materai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat legitimasi yang memberikan kepastian hukum terhadap dokumen administratif. Selain itu, keberadaan bea materai juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena penggunaan materai menjadi salah satu bentuk pemenuhan kewajiban administratif yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi dan hukum. Di sisi lain, peran bea materai juga terlihat dalam mendukung penerimaan negara dan meningkatkan transparansi dalam pengawasan transaksi. Dengan adanya kewajiban penggunaan bea materai, pemerintah dapat lebih mudah melakukan kontrol terhadap dokumen yang digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem administrasi perpajakan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan bea materai yang benar serta adanya potensi kesalahan dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi agar peran bea materai dapat berjalan secara optimal dalam mendukung sistem perpajakan yang efektif.

Tabel 2. Implementasi Bea Materai Elektronik

No	Aspek Implementasi	Deskripsi	Manfaat	Kendala
1	Digitalisasi	Materai berbasis elektronik	Praktis dan efisien	Literasi digital rendah

2	Aksesibilitas	Mudah diakses secara online	Hemat waktu	Keterbatasan jaringan
3	Keamanan Sistem	Sistem berbasis teknologi	Mengurangi pemalsuan	Risiko keamanan data
4	Integrasi Sistem	Terhubung dengan pajak	Administrasi modern	Sistem belum merata
5	Pengawasan	Monitoring digital	Transparansi tinggi	Kurangnya pengawasan optimal

Implementasi bea materai elektronik merupakan bentuk modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan materai. Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat menggunakan bea materai secara lebih praktis tanpa harus membeli materai fisik. Hal ini memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi, terutama yang dilakukan secara online, seperti perjanjian elektronik dan transaksi digital lainnya. Selain itu, digitalisasi bea materai juga mendukung integrasi sistem perpajakan yang lebih modern, sehingga mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan data perpajakan secara lebih akurat dan terstruktur. Namun, penerapan bea materai elektronik juga menghadapi berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, yang menyebabkan masih banyak wajib pajak yang belum memahami cara penggunaan materai elektronik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang belum merata, juga menjadi hambatan dalam implementasi sistem ini. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian penting, mengingat sistem digital rentan terhadap ancaman siber. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keamanan sistem, sosialisasi yang lebih luas, serta pengembangan infrastruktur teknologi agar implementasi bea materai elektronik dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 3. Efektivitas dan Permasalahan Bea Materai

No	Aspek Efektivitas	Deskripsi	Dampak	Permasalahan
1	Kepastian Hukum	Dokumen sah secara hukum	Mengurangi sengketa	Salah penggunaan
2	Kepatuhan	Meningkatkan kesadaran pajak	Tertib administrasi	Kurang pemahaman
3	Efisiensi	Mempermudah proses administrasi	Hemat waktu	Sistem belum optimal
4	Transparansi	Pengawasan lebih jelas	Akuntabilitas meningkat	Kurang pengawasan
5	Regulasi	Aturan jelas dan tegas	Kepastian hukum	Interpretasi berbeda

Efektivitas penerapan bea materai dalam administrasi perpajakan dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan kepastian hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam berbagai transaksi. Dengan adanya bea materai, dokumen yang dihasilkan menjadi lebih sah dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkontribusi dalam mengurangi potensi sengketa yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan status dokumen. Selain itu, bea materai juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku, sehingga menciptakan sistem administrasi yang lebih tertib dan teratur. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penerapan bea materai. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penggunaan materai, baik dari segi nominal maupun jenis dokumen yang dikenakan. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat agar efektivitas bea materai dalam administrasi perpajakan dapat semakin meningkat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa bea materai memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung administrasi perpajakan di Indonesia, baik dari aspek legalitas dokumen, kepatuhan wajib pajak, maupun kontribusinya terhadap penerimaan negara. Keberadaan bea materai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat legitimasi hukum yang memberikan kepastian terhadap dokumen dalam berbagai transaksi ekonomi dan hukum. Selain itu, perkembangan bea materai elektronik menjadi bentuk modernisasi yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan literasi digital, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah melalui peningkatan sosialisasi, penguatan regulasi, serta optimalisasi teknologi agar peran bea materai dapat berjalan secara maksimal dalam mendukung sistem administrasi perpajakan yang efektif, tertib, dan berkeadilan.

REFRENSI

- Aulia, R., & Pratama, D. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak terhadap penggunaan bea materai elektronik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 5(1), 33–42.
- Biran, A. H. L., Bandaso, N., & Ismayadi, Z. (2024). Bea materai dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3(2), 45–53. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3865>
- Dewangga, H., Suryokumoro, H., & Widhiawati, D. (2025). Akibat hukum atas pengenaan bea materai lebih dari satu dalam pengajuan surat keterangan bebas PPh waris. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 120–130. <https://doi.org/10.31933/s4ad5n07>
- Hidayat, M., & Sari, N. (2022). Implementasi bea materai elektronik dalam transaksi digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), 88–97.
- Kurniawan, A., & Lestari, P. (2023). Efektivitas penerimaan bea materai pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 14–25.

- Maulana, F., & Rahmawati, E. (2021). Peran bea materai dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 101–110.
- Nugroho, S., & Fitriani, L. (2024). Digitalisasi bea materai dan dampaknya terhadap administrasi perpajakan. *Jurnal Sistem Informasi Pajak*, 3(1), 22–31.
- Prasetyo, B., & Wulandari, T. (2022). Analisis hukum bea materai dalam dokumen elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 411–420.
- Rahayu, A., Burhan, I., Afifah, N., & Arifin, R. (2024). Tinjauan penerimaan bea meterai pada kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. *Jurnal Pabean*, 6(1), 1–10. <https://journal.politeknikbosowa.ac.id/pabean/article/view/519>
- Rahman, A., & Putri, D. (2023). Evaluasi kebijakan bea materai dalam sistem perpajakan nasional. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 7(2), 67–78.
- Siregar, H. S., & Lubis, R. (2024). Peran bea materai dalam administrasi perpajakan modern di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*, 5(2), 90–102.
- Suwarno, I. G., & Haryanto, I. (2021). Tinjauan yuridis fungsi bea materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian jual beli online. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 342–347. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2846>
- Tambunan, K. D. A. I., & Amanda, R. (2025). Objek dari bea materai dalam sistem perpajakan Indonesia. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 18(7), 161–170.
- Wulan, N. M. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2022). Kekuatan hukum bea materai ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(2), 210–220. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84232>
- Yanuarita, T., Katjong, K., & Mulyadi, D. (2022). Penerapan IPTEKS Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. *Jurnal Pengabdian Papua*, 7(2), 55–63. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JP/article/view/2671>